

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau sering dikenal dengan istilah *Good Corporate Government*, pada penyelenggaraan tugas-tugas institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi yang di cita-citakan. Akan tetapi upaya tersebut tampaknya belum didukung dengan sepenuh hati oleh institusi dan birokrasi yang dimaksud. (Mardiasmo, 2002)

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Kasus-kasus tersebut adalah kebanyakan berupa praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh institusi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Sumatera Barat merupakan instansi vertikal di provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala BPKP. Tugas BPKP Sumatera Barat adalah melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengawasan yang dimaksud adalah tidak hanya mencakup audit atau pemeriksaan saja, akan tetapi juga melakukan pelayanan perbaikan manajemen untuk lebih mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja

instansi dan birokrasi yang dimiliki negara. Selain itu BPKP bertugas sebagai aparat pengawasan internal pemerintahan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan upaya mencegah dan memerangi korupsi , kolusi dan nepotisme.

Salah satu bidang pekerjaan BPKP adalah bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (APD). Bidang ini melaksanakan evaluasi atas LAKIP yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja. Tujuan ini tertuang dalam Tap MPR RI NO.XI/MPR/1999 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegaskan bahwa tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada prinsip-prinsip *Good Corporate Government*.

Selain itu tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. (Crawford,2000)

Bila ternyata ditemukan ada penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut diharapkan dapat segera diketahui agar dapat diambil tindakan koreksi.

Atas dasar uraian diatas penulis mengambil judul **“PROSEDUR EVALUASI ATAS LAKIP PADA KANTOR BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalahnya adalah “Bagaimana prosedur evaluasi Lakip yang dilakukan oleh kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Magang**

### **1.3.1 Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini antara lain:

1. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi untuk mengikuti magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Diploma III Fakultas Ekomomi Universitas Andalas.
3. Untuk menulis laporan tugas akhir sebagai prasyarat ujian kompre
4. Untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat pada bangku perkuliahan
5. Untuk mengetahui prosedur evaluasi LAKIP oleh kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3.2 Manfaat Magang**

Adapun manfaat kegiatan magang ini antara lain:

1. Untuk dapat mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.

2. Dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan penulis di bidang akuntansi, relasi, dan lain-lain.

#### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja yang dimulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan selesai.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab I : Merupakan Bab yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, dan sistematika penulisan

Bab II : Merupakan Bab yang berisi landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai bahan pembahasan selanjutnya yang meliputi tentang pengertian, manfaat dan metode evaluasi kinerja serta evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja.

Bab III : Merupakan Bab yang berisi tentang gambaran umum kantor, struktur organisasi kantor dan berisi tentang pembahasan mengenai prosedur prosedur evaluasi LAKIP oleh kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV : Merupakan Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian

